

PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG BIATAN LEMPAKE KECAMATAN BIATAN KABUPATEN BERAU

**Agus Dirgajayadi¹, Dr. H. Muhammad Noor. M.Si², Hj. Letizia Dyastari.
S.Sos., M.Si³**

Abstrak

Penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Kampung Dalam Peningkatan Pembangunan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. Yang di fokuskan Bagaimana Peran Kepala Kampung Sebagai Motivator, Fasilitator, Dan Mobilisator.

Penelitian di laksanakan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala Kampung Biatan Lempake, Sekertaris Kampung, Ketua RT, beserta tokoh masyarakat, yang memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan penulis.

Hasil penelitian Peran Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan Lempake adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, karena sebagai pemerintah Kampung telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan dalam meningkatkan program-program yang telah di rencanakan dalam pembangunan, sehingga sebagai Kepala Kampung adalah harus mampu menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan secara bersama, dan kemudian harus mampu menerima atas masukan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat di realisasikan atas masukan yang di sampaikan masyarakat sesuai dengan yang telah di sepakati secara bersama pemerintah Kampung beserta masyarakat di Kampung Biatan Lempake.

Kata Kunci : Peran, kepala kampung, motivator, fasilitator, mobilisator

Pendahuluan

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara jelas dipaparkan bagaimana Pemerintah Daerah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dirga.revolution@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui Undang-undang tersebut Daerah Otonom telah dan akan diberikan kewenangan secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih luas, berarti Daerah Otonomi memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menentukan masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pembangunan Desa mempunyai arti dan peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Desapun dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa dengan segala permasalahannya merupakan pembangunan yang langsung berkaitan dengan sebagian masyarakat yang berada di tingkat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam imbangan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam pembangunan desa dipandang perlu untuk menggerakkan peran serta masyarakat desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pemeliharaan. Untuk itu sangat diperlukan corak kepemimpinan yang mampu mendorong dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat agar berdaya guna demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dalam hubungannya dengan pembangunan desa, maka peranan Kepala Desa tidak dapat diabaikan, karena Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi atau pemimpin formal masyarakat pedesaan, yang merupakan faktor penentu bagi berhasilnya pelaksanaan program pembangunan desa.

Pemerintah juga menilai bahwa peran Kepala Desa sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Perencanaan pembangunan desa disusun dalam priode 6 tahun. Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu untuk memperkuat Pemerintah Desa, agar makin mampu untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desanya sendiri dan merupakan penyelenggara sekaligus penanggung jawab utama dibidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu pula berupaya menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintah desa. Bertolak dari pemikiran tersebut

diatas, maka masyarakat selalu menganggap bahwa kepala desaya adalah sebagai seorang yang mampu memecahkan masalah desanya dan sekaligus tempat tumpuan pengaduan segala persoalan anggota masyarakat. Seorang Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di desanya dan melakukan pembaharuan pembangunan yang berdaya upaya melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik lahir maupun batin.

Pembangunan Desa mempunyai arti dan peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut disamping masyarakat sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah untuk memberi arahan dan bimbingan dalam hal ini tidak mungkin dilaksanakan satu instansi saja tetapi beberapa instansi terkait. Adapun permasalahan yang memerlukan pemecahan bersama antara Kepala Desa dan BPD adalah pada pembangunan sarana desa yaitu, Kurangnya inisiatif Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini yang paling penting yaitu pembangunan jalan, yang dapat menghubungkan desa dengan desa lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian objek masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau
2. Faktor Apasaja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apasaja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau.

Manfaat Penelitian

Yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Praktis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam konsep pembangunan desa serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Mulawarman.

- b. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah
 - c. Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Pemabangunan Di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau.
- 2) Teoritis
- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desanya
 - b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.
 - c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian berikutnya dengan penelitiannya.

Kerangka Dasar Teori

Peran Kepala Desa

Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan Menurut Barbara (1995:21) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran Kepala Desa, dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawasan pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini berarti bahwa kepala desa sebagai pemimpin desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab didalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peran dari Kepala Desa itu sendiri. Karena desa memiliki hak otonom maka Kepala Desa pun memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan desa, termasuk pula dala menyelenggarakan pembangunan dan hal-hal kemasyarakatan.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintah yang terendah, yaitu Desa dan di kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong-royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dan klasifikasi Desa swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat. Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dari pembangunan pada umumnya, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan pembangunan adalah Didalam atau usaha-usaha perubahan-perubahan social (social change) tersebut berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Peran Kepala Desa sangat penting untuk mengatur sebuah proses pembangunan baik dari pembangunan segi fisik maupun non fisik, serta meningkatkan pembangunan lainnya, karena untuk desa itu sendiri dari segi pembangunan masih sangat kurang diantaranya masih buruknya kondisi infrastruktur desa yang mencakup jalan, listrik, dan air bersih. Sehingga dengan hal tersebut masyarakat sangat sulit untuk melakukan kegiatan baik dibidang usaha ataupun lainnya. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pembangunan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai . Yang terpenting dalam hal ini yaitu peran Kepala Desa sebagai pemerintah tertinggi di desa harus mampu meningkatkan pembangunan desa yaitu dengan cara, desa harus dapat mengelola alokasi sumber daya yang tepat guna, pintar-pintar dalam mendistribusikan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan pelaksanaannya dapat berhasil dengan optimal apabila dengan sejumlah aset, potensi, dan kekayaan yang ada dapat dipadukan sehingga merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi masyarakat faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Secara jelas dipaparkan apa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan

menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Definisi Konsepsional

Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau adalah Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dan sumber-sumber keuangan Desa baik dari segi perencanaan, pembiayaan, dan lain lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa lainnya dalam bidang pembangunan desa. Dimana yang dimaksud dengan Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Pembangunan adalah serangkaian tindakan Motivator, Fasilitator dan Mobilisator yang dilakukan Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal desa dalam Pembangunan fisik dan non fisik di Kampung Biatan Lempake.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana peran kepala desa dalam hal pembangunan di lokasi penelitian dengan menggunakan Library Research (Studi Kepustakaan), Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penentuan lokasi penelitian tersebut menggunakan pertimbangan jarak, yakni kelurahan yang paling dekat, dari Ibukota Kecamatan Biatan. Sumber data dari penelitian ini adalah perangkat desa dan warga yang bertempat tinggal di Kampung Biatan Lempake, 2 warga dan 3 perangkat Desa menjadi informan dan Kepala Desa menjadi key informan nya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Mobilisator

Hasil Penelitian

Peran Kepala Kampung Sebagai Motivator Dalam Pembangunan di Kampung Biatan Lempake

Kepala Kampung sebagai Kepala pemerintahan Kampung dalam hal ini sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu

bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan Kampung dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa dorongan diri Kepala Kampung selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat Kampung khususnya Kampung Biatan Lempake akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Kampung Biatan Lempake karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Kampung sangat di perlukan dan dinantikan oleh masyarakat Kampung. kerja sama antar pemerintah Kampung dan masyarakat sejauh ini terlihat baik yaitu telah berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan guna untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada warga untuk ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan atau program kerja pemerintah Kampung, serta menjaga kerjasamanya dalam pembangunan Kampung. Kepala Kampung secara langsung memberikan pengarahan dan pemahaman yang baik, yang dorongan itu bisa dilakukan melalui Kepala Dusun dan Ketua RT secara langsung yang tidak lain merka merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Kepala Kampung untuk nantinya bisa mengkoordinir dengan baik masyarakat, bahwa dorongan Kepala Kampung sebagai motivator sangat penting sekali guna dalam peningkatan pembangunan tersebut. Sebagai bukti nyata proses pemberdayaan masyarakat yaitu dilibatkannya masyarakat dalam proses penggalian gagasan arah pembangunan Kampung dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMDes) sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPDDes) yang selanjutnya di terapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah Kampung telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan sumber daya yang ada dalam rangkaian proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kampung. Salah satu yang sering menghambat dalam perencanaan pembangunan adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri karena sebagian besar dari penduduk Kampung adalah Petani.

Peran Kepala Kampung Sebagai Fasilitator Dalam Pembangunan di Kampung Biatan Lempake

Kepala Kampung sebagai fasilitator adalah telah memberikan bantuan fasilitas berupa alat kepada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gula untuk meningkatkan pembangunan terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan fasilitas untuk mempermudah dari memperlancar proses kegiatan untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik, sehingga dimana dalam penyediaan fasilitas dalam pembangunan adalah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, oleh sebab itu Kepala Kampung dalam memberikan fasilitas adalah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake yaitu dengan menggunakan dana yang telah disediakan oleh Kepala Kampung. Dengan adanya fasilitas yang di sediakan oleh Kepala Kampung masyarakat dapat bekerjasama untuk

meningkatkan pembangunan demi kemajuan Kampung Biatan Lempake karena pembangunan adalah merupakan suatu yang ingin di capai untuk memajukan Kampung. Oleh sebab itu Kepala Kampung Biatan Lempake dalam pemberian fasilitas sangat di dukung oleh masyarakat terhadap pencapaian dalam pembangunan karena merupakan tugas utama sebagai kepala Kampung menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam pemberian fasilitas yang diberikan oleh Kepala Kampung Biatan Lempake pemerintah Kampung serta masyarakat setempat dapat berperan aktif untuk ikut dalam penyelenggaraan pembangunan di Kampung Biatan Lempake, sebab di dalam pembangunan memang masih belum begitu baik secara menyeluruh terhadap pembangunan yang ada, akan tetapi dalam masyarakat untuk ikut serta sangat besar dalam pembangunan untuk bekerja sama karena di Kampung Biatan Lempake partisipasi masyarakat dalam bergotong royong itu sangat besar, karena dalam bergotong royong adalah merupakan kebudayaan masyarakat perkampungan, dengan adanya kegiatan tersebut berpengaruh pada peningkatan pembangunan yang telah direncanakan bersama, sehingga Kepala Kampung hanya menyediakan fasilitas yang telah diperlukan memperbaiki dan membangun Kampungnya.

Peran Kepala Kampung Sebagai Mobilisator Dalam Pembangunan di Kampung Biatan Lempake

Kepala Kampung sebagai mobilisator atau penggerak yang bekerja sama dengan pihak PNPM dan tenaganya diambil dari warga masyarakat setempat dan ada juga dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat setempat hal ini dapat penulis lihat yaitu perbaikan parit/got, semenisasi dan perbaikan jalan dan lain sebagainya di setiap RT, contohnya pada jalan semenisasi dan perbaikan parit atau got dilakukan oleh PNPM melalui tenaga masyarakat setempat dan perbaikan jalan usaha tani yang dilakukan oleh Kelompok masyarakat sendiri. Selain itu Kepala Kampung sebagai penggerak mengajak warganya untuk melakukan kegiatan kegiatan baik itu perbaikan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya. Di tahun ini saja Kepala Kampung menggerakkan masyarakat untuk mengajak warga Kampung untuk membersihkan dan memperbaiki jalan usaha tani, serta melakukan perbaikan jembatan, dan perbaikan jalan serta perbaikan parit/got. Selain itu Kepala Kampung menghimbau warga Kampung untuk dapat menjada fasilitas fasilitas yang ada saat ini, untuk itu Kepala Kampung harus mengawasi dan bekerja sama dengan warga dan tentunya juga menjaga keharmonisan dan tetap berkoordinasi yang baik dengan warga. Dengan demikian Kepala Kampung akan turut aktif di dalamnya sebagai penggerak untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, sehingga Kepala Kampung benar benar dapat berperan dalam pembangunan. Dengan demikian maka Kepala Kampung sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran Kepala Kampung sebagai Motivator dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake adalah merupakan pemberi semangat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga Kepala Kampung Biatan Lempake sebagai motivator sudah berjalan dengan baik, karena Kepala Kampung secara langsung telah mengarahkan masyarakat dan memberikan motivasi terhadap apratur Kampung sampai dengan masyarakat supaya masyarakat dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala Kampung guna untuk meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan Lempake, karena dengan dorongan dari motivasi yang diberikan oleh Kepala Kampung kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan.
2. Peran Kepala Kampung sebagai Fasilitator dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake adalah terlihat berjalan secara optimal dalam memfasilitasi terhadap pembangunan, hal ini terlihat bahwa di setiap kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan seperti infrasturktur jalan, Kepala Kampung telah memberikan fasilitas kepada masyarakat maupun aparat Kampung guna untuk meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan Lempake. Dimana Kepala Kampung dalam pemberian fasilitas terhadap pembangunan yaitu adalah dari infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya, Kepala Kampung telah memfasilitasi kepada masyarakat agar dapat bias ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dimana Kepala Kampung telah menyediakan berupa alat mobil maupun dengan alat-alat lainnya guna untuk kelancaran proses dalam kegiatan pembangunan. maka dari itu untuk menunjang kelancaran pembangunan di Kampung Biatan Lempake seperti yang berjalan pada saat ini bahwa masyarakat sangat berperan aktif dengan gotong royong untuk meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan Lempake karena dengan melihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake masyarakat telah berpartisipasi dengan baik demi kelancaran pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung
3. Peran Kepala Kampung sebagai Mobilisator dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake sudah cukup baik, khususnya dalam mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bekerja sama untuk kemajuan Kampung Biatan Lempake, oleh karena itu Kepala Kampung telah memberikan arahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, Seperti kegiatan gotong royong, perbaikan fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah Kampung

Biatan Lempake. Dengan demikian Kepala Kampung telah memberikan arahan langsung kepada masyarakat dengan cara mengadakan rapat bersama masyarakat di mana di dalam rapat tersebut Kepala Kampung telah menyampaikan kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan, di mana Kepala Kampung telah mengajak masyarakat sekaligus memberikan dorongan kepada masyarakat, dimana kepala Kampung juga telah melibatkan kepada masyarakat dalam penyusunan aspirasi masyarakat yang telah di keluarkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pembangunan, karena dari aspirasi masyarakat tersebut Kepala Kampung beserta aparat Kampung dapat membuat rancangan bersama atas apa yang telah di sampaikan oleh masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepala Kampung Sebagai Motivator harus bias menjalankan amanahnya sebagai kepala pemerintahan dengan baik, harus mampu memberikan dorongan motivasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pengaruh dari motivasi yang diberikan oleh Kepala Kampung masyarakat dapat berjalan dengan baik dari apa yang di rencanakan oleh Pemerintah Kampung. Sehingga Kepala Kampung harus mampu mendorong masyarakat maupun aparat pemerintah Kampung Biatan Lempake agar bias saling bekerja sama menjadi lebih baik untuk kemajuan Kampung Biatan Lempake kedepannya.
2. Kepala Kampung sebagai Fasilitator harus mampu memberikan Bantuan secara terus menerus serta mampu memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan guna untuk mempercepat proses pembangunan di Kampung Biatan Lempake. Dan kepala Kampung harus mampu meningkatkan Pembangunan fasilitas yang lainnya, yaitu berupa Listrik dan air bersih untuk masyarakat karena semua itu adalah merupakan pengaruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berada pada daerah Biatan Lempake. Dimana antara masyarakat dan pemerintah Kampung dalam peningkatan pembangunan yang terlihat pada wilayah Kampung Biatan Lempake.
3. Kepala Kampung sebagai Mobilisator atau penggerak dalam masyarakat, Kepala Kampung harus mampu meningkatkan menjadi lebih baik dalam mengarahkan masyarakat agar bias ikut serta dalam pembangunan yang lebih baik, karena sebagai Kepala Kampung adalah merupakan pemimpin tertinggi di wilayah Kampung Biatan Lempake, maka dari itu Kepala Kampung harus mampu untuk menggerakkan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan. Dari situ masyarakat dapat mampu ikut berpartisipasi terhadap pembangunan karena akibat dari arahan yang telah di berikan oleh kepala Kampung kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepala

Kampung sebagai penggerak dapat mampu mengarahkan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dwipayana, AAGN. ddk. 2004. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset
- Horton & Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Khairuddin, H. 2006. *Pembanguna Masyarakat, Liberty Yogyakarta*,
- Kozier, Barbara, 1995, *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Muljana, B.S. 2001. *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*. Jakarta: UIPress
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Angkasa.
- Prayudi, Atmosudirdjo, 2000. *Administrasi dan Management Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas. Pres.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta. Penerbit UI-Press
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Politik Pembangunan (cetakan Keenam)*. Yogyakarta : Tiara Wasana Yogya.
- Widjaja AW. 1993. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta. Rajawali

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Perda Kabupaten Berau Tahun 2007
- RPJM Kampung Biatan Lempake Tahun 2016 – 2021

Sumber Internet :

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah-kepala-desa.html>
- <http://www.sselajar.net/2012/08/kepemimpinan.html>

<http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pemerintah-desamenurut-para-ahli.html>
<http://stkipbima.ac.id/partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-desa/>
<http://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>
<http://www.masawah.desa.id/2016/04/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desadan.html>